

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar belakang

Kesejahteraan masyarakat merupakan tujuan dan upaya pemerintah saat ini yang dilakukan dengan berbagai cara baik dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi, pembangunan infrastruktur, peningkatan gizi, usaha menurunkan angka kemiskinan, peningkatan mutu pendidikan dan sebagainya. Untuk tercapainya semua tujuan tersebut harus dimulai dari lingkup pemerintahan yang paling kecil di dalam suatu negara yaitu pemerintahan desa. Menurut Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa, desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang memiliki wewenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, dan hak usul atau hak tradisional yang diakui dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Hal ini ditunjukkan dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Undang-Undang ini mencantumkan peraturan tentang penggunaan dan pengelolaan asset desa dan dana desa.

Penggunaan dana desa diprioritas untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup serta penanggulangan kemiskinan dan dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPD). Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari dana desa yang didasarkan pada program yang ditetapkan oleh

bupati/wali kota mengenai kegiatan yang dibiayai dari dana desa. Dana desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan dana desa dengan syarat mendapat persetujuan bupati/wali kota dan memastikan pengalokasian dana desa untuk kegiatan yang menjadi prioritas telah terpenuhi atau kegiatan pembangunan dan pemberdayaan telah terpenuhi (Kemenkeu, 2020).

Dana desa dianggarkan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota yang dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk diberikan kepada setiap desa sebagai pembiayaan penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan dan sebagai salah satu sumber pendapatan desa (BPS, 2020). Dana desa bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan, memajukan perekonomian desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa, dan memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan meningkatkan pelayanan publik di desa seperti membangun fasilitas-fasilitas publik, salah satu contohnya seperti membangun puskesmas desa (Kemenkeu, 2020).

Menurut Lalira, *et al.* (2018), peran pemerintah dalam mengalokasikan dana desa untuk penurunan kemiskinan sangat penting, contohnya dalam membangun infrastruktur maupun pemberdayaan masyarakat, pemerintah harus memprioritaskan tenaga kerja dari masyarakat sendiri sehingga masyarakat bisa mendapatkan pendapatan, dan juga harus ada pemerataan dalam menyalurkan pekerja-pekerja dalam pembangunan desa. Sehingga dana desa ini bisa bermanfaat dalam penurunan angka kemiskinan. Menurut Sunu

dan Utama (2019), pemberian dana desa merupakan wujud dari pemenuhan hak desa untuk menyelenggarakan otonominya agar tumbuh dan berkembang. Perbaikan akses terhadap konsumsi pelayanan sosial (pendidikan, kesehatan, dan gizi) merupakan alat kebijakan penting dalam strategi pemerintahan secara keseluruhan untuk mengurangi angka kemiskinan dan memperbaiki tingkat kesejahteraan dalam suatu wilayah.

Ambros, *et al.* (2020), dalam Potret Tata Kelola Pemerintahan di Provinsi NTT mengatakan, bahwa pada beberapa dekade terakhir, program pemerintahan Joko Widodo untuk desa-desa menitikberatkan pada pemberdayaan agar desa-desa partisipatif dan kolaboratif membangun bangsa. Akan tetapi kontrol pengelolaannya harus restriktif dan dijaga secara maksimal untuk tetap transparan dan akuntabel, sehingga tidak ada kegiatan dan program desa yang tidak diketahui masyarakat. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa meningkatkan kapasitas aparatur desa untuk bekerja secara profesional. Namun kenyataannya masih banyak juga catatan negatif terkait program dana desa seperti memudarnya kohesi sosial di kalangan masyarakat, aparatur desa menyelewengkan anggaran sehingga menyebabkan tingkat kemiskinan tidak mengalami penurunan.

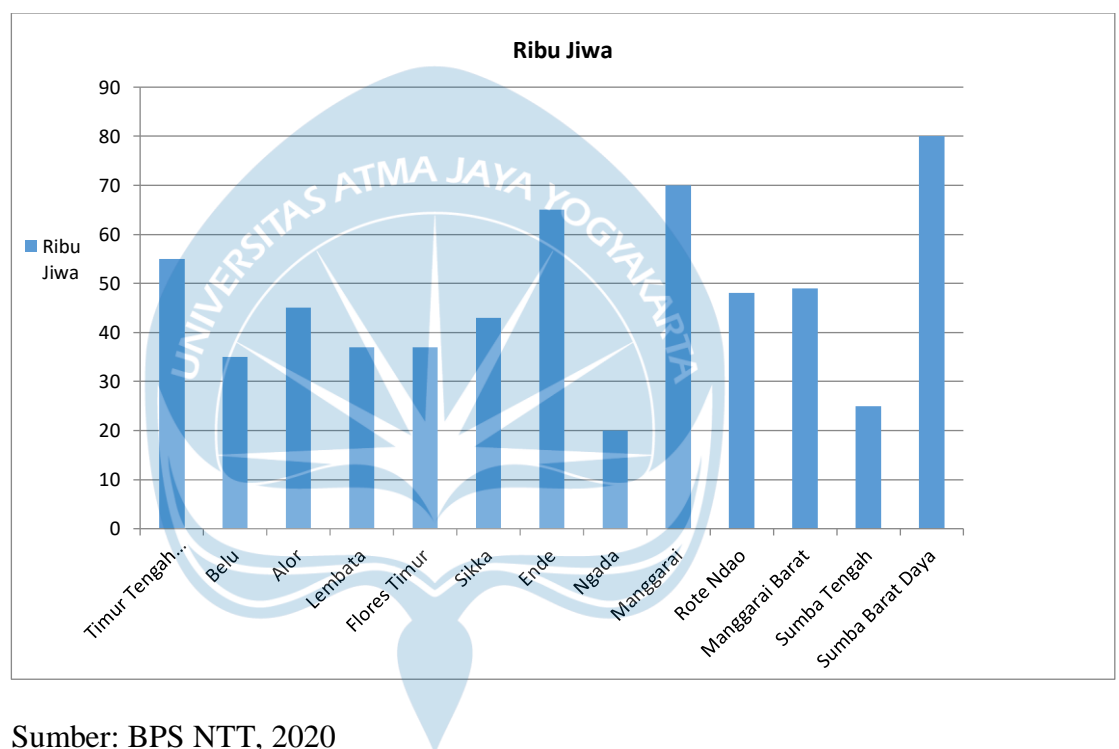
Kemiskinan menjadi persoalan yang menjadi dasar perhatian pemerintah sebab sampai saat ini kasus kemiskinan masih sangat sulit untuk diatasi. Sejak awal kemerdekaan, Indonesia telah mempunyai perhatian besar terhadap terciptanya masyarakat yang adil dan makmur sebagaimana termuat dalam alinea keempat Undang-Undang Dasar 1945. Program-program pembangunan

yang dilaksanakan selama ini juga selalu memberikan perhatian besar terhadap upaya pengentasan kemiskinan karena pada dasarnya pembangunan yang dilakukan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Meskipun demikian, masalah kemiskinan sampai saat ini terus-menerus menjadi masalah yang berkepanjangan (Bappenas 2020).

Ritonga (2020), mengatakan pada dasarnya ada dua faktor penting yang dapat menyebabkan kegagalan program penanggulangan kemiskinan di Indonesia. Pertama, program-program penanggulangan kemiskinan selama ini cenderung berfokus pada upaya penyaluran bantuan sosial untuk orang miskin. Hal itu antara lain, berupa pangan untuk rakyat miskin dan program Jaring Pengaman Sosial (JPS) untuk orang miskin. Upaya seperti ini akan sulit menyelesaikan persoalan kemiskinan yang ada karena sifat bantuan tidaklah untuk pemberdayaan, bahkan dapat menimbulkan ketergantungan. Program bantuan untuk orang miskin seharusnya lebih difokuskan untuk menumbuhkan budaya ekonomi produktif dan mampu membebaskan ketergantungan penduduk yang bersifat permanen. Faktor kedua yang dapat mengakibatkan gagalnya program penanggulangan kemiskinan adalah kurangnya pemahaman berbagai pihak tentang penyebab kemiskinan itu sendiri sehingga program-program pembangunan yang ada tidak didasarkan pada isu-isu kemiskinan, yang penyebabnya berbeda-beda secara lokal.

Oleh karena itu manfaat atau pengaruh dari penggunaan dana desa terhadap tingkat kemiskinan perlu diperhatikan. Harapannya adalah bahwa dana desa berperan dalam mengurangi kemiskinan. Salah satu tujuan dari dana desa

adalah pengentasan kemiskinan. Dalam lingkup Provinsi Nusa Tenggara Timur salah satu kabupaten yang masih memiliki tantangan besar dalam mengatasi kemiskinan adalah Kabupaten Manggarai. Kabupaten tersebut memiliki jumlah penduduk miskin terbanyak setelah Kabupaten Sumba Barat Daya dari 13 kabupaten yang terdapat di Provinsi Nusa Tenggara Timur.



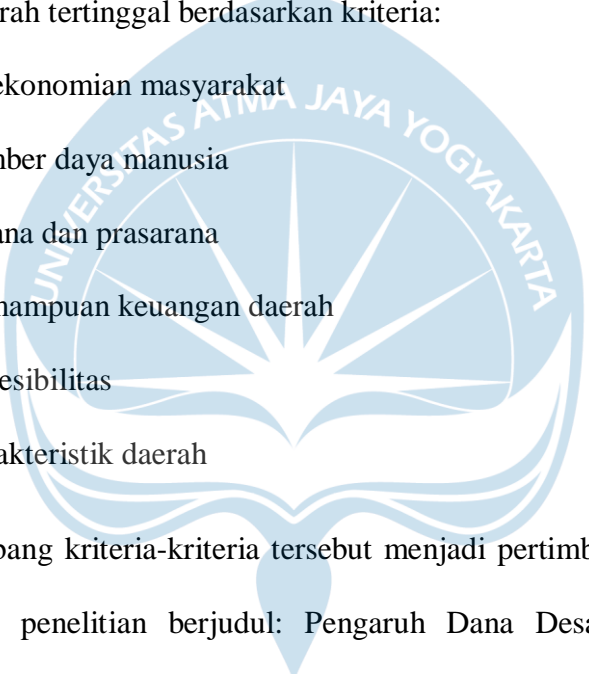
Sumber: BPS NTT, 2020

Gambar 1.1

**Data Jumlah Penduduk Miskin di NTT Menurut Kabupaten
Tahun 2019 (dalam ribuan)**

Menurut Kementerian Keuangan (2017), dalam pasal 72 ayat (2) UU 6/2014 tentang desa yang menyatakan bahwa dana desa dihitung berdasarkan jumlah desa dan dialokasikan berdasarkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis. Pemilihan objek penelitian ini

dilakukan di Kabupaten Manggarai didasarkan pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 131/2015 tentang penetapan daerah tertinggal tahun 2015–2019 bahwa Kabupaten Manggarai merupakan salah satu kabupaten yang termasuk dalam daerah tertinggal. Perpres ini menyebutkan, daerah tertinggal yakni daerah kabupaten yang wilayah serta masyarakatnya kurang berkembang dibandingkan dengan daerah lain dalam skala nasional. Suatu daerah ditetapkan sebagai daerah tertinggal berdasarkan kriteria:

- 
- a) Perekonomian masyarakat
 - b) Sumber daya manusia
 - c) Sarana dan prasarana
 - d) Kemampuan keuangan daerah
 - e) Aksesibilitas
 - f) Karakteristik daerah

Menimbang kriteria-kriteria tersebut menjadi pertimbangan penulis untuk melakukan penelitian berjudul: Pengaruh Dana Desa Terhadap Tingkat Kemiskinan Desa di Kabupaten Manggarai Tahun 2017-2019.

1.2. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimanakah pengaruh dana desa, luas desa dan jarak dari desa ke ibu kota kabupaten terhadap tingkat kemiskinan desa di Kabupaten Manggarai tahun 2017-2019?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh dana desa, luas desa, dan jarak dari desa ke ibu kota kabupaten terhadap tingkat kemiskinan desa di Kabupaten Manggarai tahun 2017-2019.

1.4. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk:

- 1) Pemerintah daerah, sebagai salah satu bahan referensi dalam mengatur dan mengalokasi dana desa untuk mengentas kemiskinan yang ada di desa di Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- 2) Masyarakat, agar masyarakat desa lebih paham mengenai bagaimana pengelolaan dana desa untuk mengatasi kemiskinan yang terjadi di desa.
- 3) Peneliti atau pembaca, sebagai bahan referensi dan pembanding studi atau penelitian yang terkait dengan riset ini.

1.5. Hipotesis Penelitian

Berdasarkan kajian empiris dalam seluruh studi dan fakta yang telah dipaparkan. Maka jawaban sementara atas masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Dana desa berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan desa di Kabupaten Manggarai, yang berarti dana desa menurunkan tingkat kemiskinan.
2. Jarak desa ke ibu kota kabupaten berpengaruh positif terhadap tingkat kemiskinan tiap desa di Kabupaten Manggarai, yang berarti jarak desa ke ibu kota kabupaten meningkatkan tingkat kemiskinan.

3. Luas desa berpengaruh positif terhadap tingkat kemiskinan desa terhadap tingkat kemiskinan tiap desa di Kabupaten Manggarai, yang berarti luas desa meningkatkan tingkat kemiskinan.

1.6. Sistematika Penulisan

Dalam bagian ini disajikan rencana sistematika penulisan skripsi sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, hipotesis, dan sistematika penulisan.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini membahas landasan teori dan studi empiris terkait yang pernah dilakukan sebelumnya yang berkaitan dengan permasalahan penelitian dan dijadikan sebagai acuan dasar penelitian.

BAB III: METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan mengenai lokasi riset, jenis data, sumber data, model penelitian, alat analisis dan batasan operasional yang digunakan dalam penelitian ini.

BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas hasil penelitian dan pembahasan mengenai pengaruh parsial dari dana desa, luas desa, dan jarak desa ke ibu kota kabupaten terhadap tingkat kemiskinan tiap desa di Kabupaten Manggarai.

BAB V: PENUTUP

Bab ini membahas kesimpulan dari hasil penelitian dan saran sehubungan dengan permasalahan yang dibahas.

